



Korban Dibantu Rp14 Juta

Mekanisme Bantuan Bencana Kebakaran Diatur dalam Perwal Baru

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyederhanakan aturan pemberian bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban musibah kebakaran. Besarnya bantuan yang diberikan juga dinaikkan, menjadi maksimal Rp14 juta.

Kebijakan itu diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 29 Tahun 2014 mengenai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Yogyakarta.

Perwal itu menggantikan Perwal sebelumnya yakni

” Untuk prosedur masih sama, yakni harus ada laporan dari kelurahan. Setelah itu nanti akan ada tim yang akan melakukan pengecekan di lapangan ”

TRI MARYATUN
Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinsosakertrans Kota Yogyakarta

Perwal 134 Tahun 2009 mengenai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosia

al, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta, Tri Maryatun menuturkan peraturan yang baru tersebut menyederhanakan aturan yang lama. “Peraturan baru lebih sederhana. Kriteria penerima lebih disederhanakan agar aplikatif,” ujarnya di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (14/8).

Dibanding Perwal lama, jumlah bantuan yang diberikan untuk korban musibah kebakaran dalam Perwal baru juga lebih besar. Jumlah bantuan yang diberikan Pemkot Yogyakarta untuk korban kebakaran maksimal Rp14 juta. Dalam Perwal lama, jumlah bantuan maksimal yang diberikan Rp9,5 juta.

Di dalam peraturan baru tersebut tidak lagi ada klasifikasi rumah permanen atau semi permanen, namun semuanya dianggap sama. Asalkan rumah tinggal itu berada di wilayah adminis-

M
Bersambung ke Hal 14 305

Instansi	Nilai Berita	
1. <i>Dinsosakertrans</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> A
2. <i>B.P.B.D.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> B
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> C
4.		<input type="checkbox"/> D
5.		<input type="checkbox"/> E

Baca
 Untuk diketahui

Korban Dibantu

Sambungan Hal 13

trasi Kota Yogyakarta, dimiliki oleh warga Kota Yogyakarta dan tidak berada di persil negara. Pun tidak ada unsur kesengajaan untuk dibakar dan rumah tinggal itu belum diasuransikan.

"Untuk prosedur masih sama, yakni harus ada laporan dari kelurahan. Setelah itu nanti akan ada tim yang akan melakukan pengecekan di lapangan," kata Tri Maryatun.

Pengecekan tersebut untuk menghitung besarnya kerugian yang diderita dan menentukan besarnya bantuan yang akan dikucurkan. Meski Perwalbaru ditetapkan pada awal Juni 2014, peraturan tersebut berlaku surut mulai 1 Januari 2014.

Tiga Kejadian

Pada 2013, dari catatan Dinsosnakertrans ada enam kasus kebakaran yang mendapatkan bantuan dari

Pemkot Yogyakarta. Jumlah bantuan yang disalurkan mencapai Rp22,45 juta.

Sedangkan hingga Agustus 2014 ini sudah ada tiga kasus kebakaran dengan jumlah bantuan yang dikeluarkan mencapai Rp27 juta. Pencairan bantuan bagi korban kebakaran butuh waktu sekitar dua bulan. Bantuan dana itu digunakan untuk memperbaiki fisik bangunan yang rusak akibat musibah kebakaran.

"Untuk data yang masuk tahun ini belum semua dicairkan karena kemarin terbentur pelaksanaan Pilpres," ujar Tri Maryatun.

Selain bantuan uang warga yang terkena musibah mendapat bantuan logistik yang juga disalurkan oleh Dinsosnakertrans. Bantuan berasal dari Kementerian Sosial.

"Kalau logistik dari Kemensos ada, namun itu

tidak hanya untuk musibah kebakaran namun juga untuk musibah yang lain. Bantuan berupa bahan pangan yang perhitungan bantuannya untuk tiap individu," jelas Tri Maryatun.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Agus Winarto menyebutkan, pengecekan kondisi rumah pascakebakaran yang akan diberi bantuan Pemkot, BPBD juga ikut dalam tim taksasi. "Memang ada tim khusus yang melakukan verifikasi untuk mengetahui kerugian yang diderita," kata Agus.

Pihaknya juga menyalurkan bantuan nonuang yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana. Sebelum menyalurkan bantuan, Agus menyebut BPBD berkoordinasi dengan Dinsos agar bantuan tidak dobel.(dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005